

IMPLIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENERIMAAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

PAMELA GALINA

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This research was aimed at identifying the influence of (1) investment on economic growth, and (2) economic growth on revenues of Muara Enim Country. The secondary data consisted of those collected from Central Statistics Bureau, Bank of Indonesia, Investment Board, other agencies; they dealt with the data on investments, regional revenues, gross regional domestic products, and economic growth by district in the country.

The research results show that the investment elasticity on the economic growth pointed at 0.58%. In case the investment changed into 1%, this means that the elasticity increased by 0.58%. The elasticity of the economic growth to revenues was -0.21%. In other words, if the economic growth increased by 1%, the revenues decreased into -0.21%. Districts of Semende Darat Laut, Lawang Kidul, Muara Enim, Talang Ubi and Gelumbang were identified as the areas that experienced the economic growth.

To enable each district to make significant economic growth, generate incomes for the citizens, more jobs. The Country Government is recommended to implement strategic plans. The strategies include development of human resources quality, and efficient policies on investments, trade, infrastructure building, agencies. These policies should be managed in an intergrated way in order to ensure overall regional development and social welfare of the citizens.

Key words: Growth Centre, Investment, Economic Growth, Revenues

PENDAHULUAN

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam upaya perencanaan ekonomi wilayah dimana semua strategi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang ideal bagi setiap daerah atau *region*. Salah satu strategi yang sering digunakan dan yang telah dikenal dalam beberapa dekade terakhir yaitu strategi pusat pertumbuhan (*growth-pole strategy*). Strategi pusat pertumbuhan ini secara spesifik terfokus pada kegiatan investasi di lokasi-lokasi yang terbatas atau *region* (biasanya sebagai bagian dari pertimbangan-pertimbangan usaha dalam memodifikasi struktur spasial dari sebuah *region*) dalam upaya mendorong aktifitas ekonomi, sehingga meningkatkan tingkat kemakmuran suatu daerah.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Perroux menyatakan bahwa kota merupakan suatu "tempat sentral" dan sekaligus merupakan kutub pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat, terutama daerah perkotaan, yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas, yang berbeda.

Pengembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada pusat-pusat pertumbuhan dengan industri padat modal akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah dengan industri padat modal tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan kelembagaan sosial, sehingga secara alami kondisi tersebut dapat meningkatkan daya tarik investasi.

Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yaitu di sisi produk yang dihasilkan dari wilayah pusat pertumbuhan akan digunakan oleh industri-industri lainnya yang berada di wilayah sekitarnya (*hinterland*) dan di ekspor ke luar wilayah sedangkan pada sisi lain memberikan peluang bagi produk-produk yang dihasilkan di sekitar wilayah pusat pertumbuhan untuk digunakan oleh industri di pusat pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar. Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya serta sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Nahrawi, 2005; 1).

Menurut Pebrina (2005;5) arah bagi kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan melihat spesialisasi keunggulan dari tiap wilayah atau kecamatan. Skala yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah dalam sistem ekonomi, administrasi, dan pelayanan umum berakibat fungsi dari wilayah tersebut berbeda pula dalam pola, harmonisasi yang mampu saling menunjang wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dalam rangka penyelarasan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah dikemukakan konsep pendekatannya yaitu pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan dengan ruang lingkup kecamatan dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antar wilayah dapat lebih merata dengan menemukan spesialisasi dari masing-masing wilayah. Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk mengidentifikasi aktifitas-aktifitas ekonomi yang menjadi keunggulan dari suatu kecamatan sehingga dapat ditentukan kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan melihat spesialisasi keunggulannya.

Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan sebuah harapan bagi seluruh lapisan masyarakat, utamanya investor, pemerintah dan perbankan. Terkait dengan hal tersebut maka kajian faktor-faktor ekonomi seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, infrastruktur dasar berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Kajian yang terkait dengan hal tersebut telah banyak mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, pengusaha, perbankan dan kalangan akademisi. Namun demikian iklim investasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi tersebut diperkirakan dipengaruhi pula oleh faktor lainnya. Karena itu dipandang perlu adanya suatu kajian mengenai dimensi lain yang patut diduga mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Pusat Pertumbuhan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Di Kabupaten Muara Enim".

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikemukakan yaitu: a) Bagaimana pengaruh investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim, dan b) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Kabupaten Muara Enim.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tempat Sentral

Walter Christaller menulis buku *Die Zentralen One in Sud Deutchland*, Jena, (histav Fischer, 1933 yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh E.W. Bastin

dengan judul *Central Places in Southern Germany*, Englewood Cliffs, N.J, Prentice hall, 1966). Walter Christaller mengintroduksikan teori tempat sentral (*central place theory*). Sedangkan inti pokok dari teori tempat sentral adalah menjelaskan model hierarki perkotaan (*urban hierarchy*) Adisasmita, Rahardjo, (2008, Hal 63).

Menurut teori ini bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya yang mengemban fungsi sosial-ekonomi bertindak untuk melayani daerah *hinterland-nya* (desa atau kota lainnya yang mempunyai pengaruh hubungan yang kuat). Kota yang mampu melayani masyarakat kota selalu dikaitkan dengan sosial ekonomi utama suatu kota. Fungsi kota dicerminkan oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan yang dimilikinya.

Teori Kutub Pertumbuhan

Menurut Perroux, pertumbuhan ataupun pembangunan tidak dilakukan diseluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi lokasi tata ruang diidentifikasikannya sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan saran pengembangan ke luar dan kekuatan tarikan ke dalam.

Perkembangan modern konsep titik pertumbuhan terutama berasal dari karya ahli-ahli teori ekonomi regional Perancis yang dipelopori oleh Francis Perroux. Perroux (1955) telah mengembangkan konsep kutub pertumbuhan, dalam bahasa Perancis, disebut sebagai *pole de croissance* atau *pole de development* atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *growth pole*. Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan-perusahaan dan industri-industri serta saling ketergantungannya dan bukan pola mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara intra maupun secara inter, pada dasarnya konsep kutub pertumbuhan mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak.

Teori Basis Ekonomi

Keterkaitan perekonomian pusat pertumbuhan dengan daerah sekitar (*hinterland*) sebagai salah satu kriteria, penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki memungkinkan dilakukannya pemusatan kegiatan sektoral pada masing-masing daerah yang akan mempercepat pertumbuhan di daerah. Menurut Samuelson dan Nordhaus, (1995 : 97) masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. Ekonomi spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antarindividu dan antarnegara yang demikian luas, yang merupakan ciri dari suatu perekonomian maju. Adanya keterkaitan ekonomi (spesialisasi) antar daerah yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing akan memungkinkan Bergeraknya perekonomian masing-masing daerah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan (Aswandi dan Kuncoro, 2002:30).

Teori ini menyatakan bahwa dalam teori basis ekonomi yang menjadi faktor penentu utama, pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan Industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja atau *job creations* (Arsyad, 1999: 116).

Teori Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal

memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, prediksi tingkat keuntungan, prediksi mengenai kondisi ekonomi ke depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan keuntungan perusahaan (Sukirno, 2004).

Investasi dalam pengertian konseptual merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat multi dimensional. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif (McMeer, 2003). Akan tetapi dalam dunia nyata bahwa seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah (Bachri, A. A., 2004).

Teori Pertumbuhan

Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznets (dalam Jhingan 2000:57) adalah kenaikan dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional atau kelembagaan dan ideology terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. (Arsyad, 1999:7). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan factor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap factor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik factor produksi juga akan turut meningkat (Susanti,dkk 2000:23).

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, sedangkan aspek yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Kemudian aspek ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, 50 tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita, Oleh karena itu proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generation yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu memerlukan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode selanjutnya. (Sukirno 2004:421).

Sumber Penerimaan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Widjaja, 2002 : 147). Sumber sumber penerimaan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayah sendiri, yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 dana perimbangan terdiri dari: Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain pendapatan sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hibah atau dana darurat, sumbangan pihak ketiga dan sebagainya.

Ketiga sumber penerimaan di muka, yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi PAD dalam APBD merupakan cerminan keberhasilan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Konsep Elastisitas

Konsep elastisitas yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan/ ditransformasikan dari teori elastisitas permintaan dan atau elastisitas penawaran. Besar kecilnya jumlah permintaan dan atau penawaran tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan atau penawaran.

Untuk mengetahui sampai berapa jauh pengaruh dari tingkat perubahan yang terjadi antara variabel-variabel terkait digunakan konsep elastisitas.

Tingkat elastisitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui sampai berapa besar tingkat perubahan terjadi akibat pengaruh besarnya persentase (%) perubahan yang terjadi pada satu variabel, dengan membandingkannya dengan besaran perubahan pada variabel lainnya yang diamati.

Elastisitas Penerimaan

Konsep elastisitas yang dekat/identik pengaruhnya dengan penerimaan Retribusi Daerah dalam bahasan ini, digunakan konsep elastisitas penerimaan (*income elasticity*). *Income elasticity* adalah besarnya persentase perubahan permintaan terhadap persentase penerimaan, dengan rumusan;

$$E_i = \frac{\% \text{ Perubahan } PDRB}{\% \text{ Perubahan } Y} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana E_i : elastisitas penerimaan, PDRB: kuantitas pertumbuhan ekonomi dan Y: penerimaan.

Kriteria yang digunakan dari satuan elastisitas yang diperoleh, yaitu jika hasil koefisien elastisitasnya sebagai berikut:

1. Tak terhingga (∞) maka elastisitasnya dinamakan elastisitas sempurna (*perfect elastic*).
2. Lebih besar dari satu (>1) maka elastisitasnya dinamakan elastis (*relatively elastic*).

3. Sama dengan satu ($=1$) maka elastisitasnya adalah elastisitas uniter atau
4. *unitary elastic*.
5. Kurang dari satu (<1) maka elastisitasnya dinamakan inelastis (*relatively inelastic*).
6. Sama dengan nol ($=0$) maka elastisitasnya dinamakan inelastis sempurna (*perfect inelastic*)

Penelitian Terdahulu

Beberapa karya tulis yang dilakukan berkaitan dengan analisis pusat pertumbuhan antara lain :

Irwan (2005) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Potensi Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan”. Menggunakan teori *growth pole* untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan guna memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat. berdasarkan hasil perhitungan besaran nilai LQ di Kabupaten Lahat memberikan gambaran awal bahwa pada tahun 1993 hingga tahun 2000 terdapat empat sektor unggulan, yakni sektor pertanian, bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dan ini merupakan sektor basis bagi Kabupaten Lahat

Pebrina (2004) melakukan penelitian dengan judul “Analisis pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”, menggunakan analisis scalogram dan Model Rasio Pertumbuhan, *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Overlay* untuk meneliti tentang pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dari penelitian tersebut diperoleh lima (5) kecamatan yang teridentifikasi sebagai pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Talang Kelapa, Betung, Banyuasin I, Banyuasin II, dan Kecamatan Banyuasin III.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas konsentrasi pertumbuhan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di tingkat kecamatan, mengidentifikasi daerah kecamatan pendukungnya (*hinterland*), serta membahas Pertumbuhan Ekonomi terhadap investasi dan Pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan di Kabupaten Muara Enim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak yang berkepentingan seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Badan Penanaman Modal. Data yang dimaksud adalah data investasi, data penerimaan daerah dan data Produk Domestik Regional Bruto menurut kecamatan di Kabupaten Muara Enim dan laju pertumbuhannya, yang dapat diperoleh dari lembaga, dinas atau badan pemerintah lainnya.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis *Scalogram* untuk mengukur tingkat konsentrasi fasilitas dari kegiatan pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya menggunakan teknik analisis interaksi atau gravitasi untuk mengukur seberapa jauh sebuah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan mempengaruhi dan berinteraksi dengan daerah sekelilingnya. Sedangkan untuk mengukur investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan digunakan perhitungan elastisitas titik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan estimasi yang dilakukan, maka Elastisitas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2006 terjadi perubahan sebesar 2,08 persen. Sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,63 persen. Sehingga tahun 2008 dan 2009 elastisitas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat menurun sebesar -0,07 dan -0,33 dengan rata-rata keseluruhan di tahun 2005 sampai 2009 sebesar 0,58 persen (Inelastis)..

Hasil perhitungan elastisitas Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa koefisien parameter elastisitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu; untuk faktor perubahan Investasi yang mempengaruhinya sebesar 0,58 Artinya, jika Investasi berubah sebesar 1 persen, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0,58 persen.

Tabel 1. Perhitungan Elastisitas Pengaruh investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2009 di Kabupaten Muara Enim

TAHUN	ΔI	$\Delta PDRB$	ϵ
2005	576.936	4,50	-
2006	629.118	5,44	2,08
2007	707.656	5,85	0,63
2008	1.276.341	5,67	-0,07
2009	3.190.051	4,73	-0,33
Rata-rata			0,58

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan

Berdasarkan estimasi yang dilakukan, maka Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pada tahun 2005 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2006 terjadi perubahan sebesar 1,40 persen. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar 2,57 persen. Di tahun 2008 dan 2009 elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan mengalami penurunan sebesar -4,26 dan -0,54 dengan rata-rata keseluruhan di tahun 2005 sampai 2009 sebesar -0,21 persen.

Tabel Data Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Tahun 2005-2009 di Kabupaten Muara Enim

TAHUN	$\Delta PDRB$	ΔR	ϵ
2005	4,50	453.898.481.654,00	-
2006	5,44	599.144.288.310,79	1,40
2007	5,85	730.780.748.706,79	2,57
2008	5,67	844.930.278.385,92	-4,26
2009	4,73	946.769.742.227,54	-0,54
Rata-rata			-0,21

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Hasil perhitungan elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan menunjukkan bahwa koefisien parameter elastisitas penerimaan, yaitu; untuk faktor perubahan PDRB yang mempengaruhinya sebesar -0,21 (Inelastis). Artinya, jika Pertumbuhan

Ekonomi berubah sebesar 1 persen, maka Penerimaan menurun sebesar -0,21 persen atau tidak responsif

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan melalui alat analisis *scalogram* dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat lima (5) kecamatan dari duapuluh dua (22) kecamatan yang mampu dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan yang lebih baik yaitu Kecamatan Semende Darat Laut, Lawang Kidul, Muara Enim, Talang Ubi, dan kecamatan Gelumbang.

Hasil perhitungan elastisitas Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa koefisien parameter elastisitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu; untuk faktor perubahan Investasi yang mempengaruhinya sebesar 0,58 Artinya, jika Investasi berubah sebesar 1 persen, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0,58 persen

Hasil perhitungan elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan menunjukkan bahwa koefisien parameter elastisitas penerimaan, yaitu; untuk faktor perubahan PDRB yang mempengaruhinya sebesar -0,21 (Inelastis) Artinya, jika Pertumbuhan Ekonomi berubah sebesar 1 persen, maka Penerimaan akan meningkat sebesar -0,21 persen.

Bila melihat tabel distribusi PDRB Kabupaten Muara Enim dapat diketahui dari sumbangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim bila dilihat perkembangannya selama kurun waktu 2001 – 2009, maka untuk sektor pertambangan dan penggalian secara persentase cenderung mengalami penurunan. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor-sektor lainnya yaitu ke sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dari gambaran perkembangan sumbangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Muara Enim dapat disimpulkan bahwa peranan sektor ekonomi di luar sektor pertambangan dan penggalian diduga masih akan tetap menandai perkembangan ekonomi di Kabupaten Muara Enim di tahun-tahun mendatang.

Saran-saran

1. Sebagai upaya pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Muara Enim diharapkan kepada para pihak pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, untuk mempertimbangkan pola pembangunan daerah dengan berorientasi pada konsep wilayah pusat pertumbuhan. Hal ini bertujuan agar berbagai fasilitas publik, yang juga merupakan hasil-hasil pembangunan, bisa dinikmati oleh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah;
2. Perlu adanya peningkatan jumlah atas ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan terutama di kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk sebagai pusat pertumbuhan supaya tercipta pemerataan kemajuan pembangunan serta menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan yang baru;
3. Agar potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan tingkat pengangguran, pengentasan tingkat kemiskinan, maka perlu kebijakan yang bersifat strategis. Kebijakan strategis meliputi kebijakan peningkatan kualitas SDM, kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pengembangan kelembagaan. Kebijakan tersebut harus dikelola secara terpadu sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Aswandi & Kuncoro. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.17, No. 1, 2002.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2008. *Muara Enim Dalam Angka 2007*. Palembang: BPS.
- Bamim, Selamat, 2002, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah dan Retribusi Daerah di Propinsi Sumatera Selatan, *Tesis*, tidak dipublikasikan, PPS Universitas Sriwijaya
- Boex, Jameson, 2001, An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relation, subitted to : Fiscal Policy Training Program, The Georgia University July 23-August 3, 2001
- Christaller, Walter.1993. *Die Zentralen One in Sud Deutschland*. Belanda
- Citra, Dwita. 2008. Analisis pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Tidak dipublikasikan.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Jhingan.2004. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Machmud, Sofyan. 2000. Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal dan Kajian Ekonomi Universitas Sriwijaya*, PPS UNSRI. Palembang
- Machmud, Sofyan. 2002. “Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan”, *Kajian Ekonomi* Vol. 1 No. 1:40-57.
- Pebrina, Intan Yudistri. 2005. Analisis pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Vol 4, No.1., *Jurnal Kajian Ekonomi*
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shah, Anwar, editor (2003), *Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line*, Vol. 1 of *Handbook on Public Sector Performance Reviews*. Washington D.C.: The World Bank.
- Sukirno, Sadono, Oktober 1995. *Pengantar Teori MakroEkonomi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Susanti, H., Moh. Ikhsan dan widyanti.2000. *Indikator-indikator makroekonomi*, edisi kedua , Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Syafrizal, 1997. “*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*”, Prisma, LP3ES Jakarta, No. 3 Tahun XXVI, 27-38.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional ; Teori dan aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.